

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Perkembangan inflasi pada bulan april 2026 inflasi nasional masih berada pada level yang terkendali sesuai sasaran pemerintah. Di provinsi riau terjadi inflasi dengan kecendrungan meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, terutama di dorong oleh kenaikan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta beberapa komoditas hortikultura. Sebagai daerah Non IHK Kabupaten Rokan Hulu tidak memiliki angka inflasi resmi oleh karena itu pemantauan dilakukan melalui indeks perkembangan harga (IPH) dan monitoring harga harian. Pada bulan april IPH menunjukkan adanya fluktuasi harga yang dipengaruhi terutama oleh komoditas cabe merah, cabe rawit, dan bawang merah namun secara umum ketersediaan bahan pokok masih mencukupi dan distribusi berjalan lancar. Pada bulan mei 2026 inflasi provinsi riau secara tahunan (year on year) tercatat sebesar 3,95% sedangkan inflasi bulanan (month to month) sebesar 0,76%. Kenaikan ini dipengaruhi harga kelompok makanan , minuman dan tembakau, terutama komoditas cabai serta beberapa jasa. Pada bulan juni 2026 provinsi riau mengalami inflasi bulanan sebesar 0,35% dan inflasi tahunan sebesar 4,55%. Inflasi terutama di picu oleh kenaikan harga cabe merah, bawang putih dan beberapa komoditas lainnya.

Sebagai daerah Non IHK Kabupaten Rokan Hulu juga memanfaatkan indeks perkembangan harga (IPH) sebagai indikator terhadap potensi kenaikan harga, hasil pemantauan IPH selama triwulan ke II menunjukkan adanya fluktuasi pada beberapa komoditas pangan, namun kondisi tersebut masih dapat dikendalikan melalui langkah-langkah pengendalian inflasi yang dilaksanakan secara terpadu.

Resiko kedepannya yang berpotensi mempengaruhi perkembangan harga pada triwulan II antara lain :

1. Perubahan cuaca yang dapat mempengaruhi produksi komoditas hortikultura.
2. Ketergantungan pasokan beberapa komoditas dari luar daerah.
3. Gangguan distribusi akibat cuaca maupun kondisi infrastruktur.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil pemantauan harga evaluasi pelaksanaan program kerja serta koordinasi dengan perangkat daerah, selama triwulan ke II tahun 2026 terdapat beberapa permasalahan yang menjadi tantangan dalam pengendalian inflasi di kabupaten rokan hulu, yaitu:

1. Fluktuasi harga komoditas hortikultura. Harga cabe merah, cabe rawit, bawang merah masih berfluktuasi akibat perubahan cuaca, musim panen dan keterbatasan dari daerah produsen.
2. Ketergantungan pasokan dari luar daerah sebagian komoditas strategis seperti bawang merah, bawang putih, gula pasir dan beberapa komoditas lainnya masih dipasok dari luar kabupaten rokan hulu sehingga rentan terhadap gangguan distribusi dan kenaikan harga.
3. Tingginya biaya distribusi dan logistic, luas wilayah kabupaten rokan hulu serta jarak distribusi dari sentra produksi menyebabkan biaya transportasi relative tinggi dan

berpotensi mempengaruhi tingkat konsumen.

Untuk mengatasi masalah tersebut TPID kabupaten rokan hulu akan memperkuat pemantauan harga dan stok pangan secara berkala, meningkatnya koordinasi dengan BULOG distributor dan pelaku usaha, mengoptimalkan pelaksanaan gerakan pangan murah (GPM) pada wilayah yang membutuhkan. Serta mendorong peningkatan produksi pangan lokal melalui sinergi dengan perangkat daerah terkait.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah :

Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting pemerintah kabupaten rokan hulu dalam melaksanakan kebijakan pengendalian inflasi daerah yang mengacu pada strategi 4k (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif. Untuk menjaga keterjangkauan harga dilakukan yaitu pemantauan harga harian dan mingguan di pasar tradisional dan pasar modern, pelaksanaan gerakan pangan murah (GPM) bekerja sama dengan dinas ketahanan pangan, perum BULOG, distributor dan pelaku usaha. Dalam menjaga kecukupan pasokan pangan TPID telah melakukan koordinasi dengan perum BULOG untuk memastikan ketersediaan stok beras dan komoditas pangan strategis, koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk mendukung peningkatan produk pangan lokal khususnya komoditas hortikultura. Untuk menjamin distribusi barang kebutuhan pokok tetap lancar dilakukan dengan monitoring jalur distribusi komoditas pangan, pengawasan terhadap kelancaran distribusi dari distributor hingga pasar tradisional. Dalam rangka membangun sinergi dan menjaga ekspektasi masyarakat TPID melaksanakan keikutsertaan secara rutin dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi yang diselenggarakan oleh kementerian dalam negeri, rapat koordinasi TPID untuk mengevaluasi perkembangan harga, penguatan koordinasi dengan perangkat daerah serta pelaku usaha.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi daerah :

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi kabupaten rokan hulu selama triwulan ke II tahun 2026 secara umum berjalan cukup efektif hal ini didukung oleh sinergi antar anggota TPID, koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat dan pemerintah riau serta pelaksanaan berbagai program pengendalian inflasi berdasarkan strategi 4K. berdasarkan hasil evaluasi kebijakan pengendalian inflasi triwulan II telah memberikan hasil yang positif yaitu stabilitas harga barang kebutuhan pokok secara umum tetap terjaga, ketersediaan pasokan pangan dalam kondisi cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, penguatan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi resiko perubahan cuaca dan gangguan distribusi, perluasan gerakan pelaksanaan pangan murah pada wilayah yang berpotensi mengalami daerah yang bergejolak harga.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah :

Dalam pelaksanaan rekomendasi tersebut diharapkan pengendalian inflasi dikabupaten rokan hulu dapat semakin efektif dalam menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting, memperlancar distribusi serta menjaga daya beli masyarakat. Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, instansi vertical, pelaku usaha dan seluruh anggota TPID menjadi kunci dalam mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekjonomi daerah yang berkelanjutan.